

**PEMUTAKHIRAN MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018
SESUAI PAGU ALOKASI TA 2018
UNIT: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

PAGU ALOKASI 2018	
Kode	Uraian
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
1655	Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
501	Kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Kehumasan
001	Kebijakan di Bidang Penyuluhan
051	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia
052	Penyusunan Materi Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
053	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyuluhan
054	Edukasi Perpajakan Melalui Multikanal
002	Kebijakan di Bidang Pelayanan
051	Standardisasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
052	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan
003	Kebijakan di Bidang Kehumasan
051	Peningkatan Kapasitas dan Fungsionalitas Situs Pajak
052	Kampanye Perpajakan
054	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kehumasan
055	Pelaksanaan Corporate Brand Identity
004	Kebijakan di Bidang Kerjasama dan Kemitraan
201	Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan Pihak Ketiga
052	International Partnership
053	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama dan Kemitraan
054	Kegiatan Penunjang Operasional Direktorat
1656	Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan
501	Layanan Teknologi Informasi Perpajakan
001	Layanan Pemeliharaan Sistem dan Infrastruktur TIP
051	Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Infrastruktur
053	Reengineering dan Konsolidasi Teknologi Portal Website DJP
002	Layanan Bimbingan Teknis dan Evaluasi TIP
051	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
052	Koordinasi dengan Pihak Eksternal (ILAP)
053	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
998	Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan
1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis
501	Dokumen Proses Bisnis dan SOP
001	Dokumen Proses Bisnis
051	Penyusunan/Penyempurnaan Proses Bisnis
052	Bimbingan Teknis Proses Bisnis
053	Evaluasi Pelaksanaan Proses Bisnis
054	Implementasi Program Transformasi Kelembagaan, Pengembangan Manajemen Transformasi, dan Pengembangan
202	Pembentukan Mitra Pajak (Tax Agent)
203	Joint Program DJP-DJBC
002	Dokumen SOP
051	Penyusunan/Penyempurnaan SOP
053	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang
1658	Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan
501	Kebijakan di Bidang Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan
001	Kebijakan di Bidang Ekstensifikasi
051	Reviu Kebijakan Ekstensifikasi
052	Implementasi Penyempurnaan Kebijakan Teknis Ekstensifikasi
053	Implementasi CRM fungsi Ekstensifikasi
054	Implementasi Program Transformasi Kelembagaan
055	Monitoring dan Evaluasi
056	Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Tugas Direktorat
002	Kebijakan di Bidang Pendataan dan Pemetaan
051	Pengumpulan Data Geospasial Wajib Pajak melalui Kegiatan Pemetaan Lokasi dengan GeoTagging
052	Penyempurnaan Kebijakan Terkait Administrasi Pengelolaan PBB P3
053	Perluasan Kerja Sama dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional
054	Penyempurnaan Kebijakan Terkait kebijakan PBB P3
055	Penyempurnaan Kebijakan dalam rangka Pendaftaran Wajib Pajak
056	Pengelolaan Data non ILAP
204	Business Development Service (BDS)
003	Kebijakan di Bidang Penilaian
051	Perencanaan Kebijakan di Bidang Penilaian
052	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penilaian
053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Penilaian
1659	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan

PAGU ALOKASI 2018

Kode	Uraian
501	Dokumen Informasi di bidang Intelijen Perpajakan
001	Dokumen Informasi di Bidang Intelijen Stratejik
051	Persiapan Peningkatan Efektifitas Intelijen Stratejik
052	Pelaksanaan Peningkatan Intelijen Stratejik
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Stratejik
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat
002	Dokumen Informasi di Bidang Intelijen Penggalian Potensi
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penggalian Potensi
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Intelijen Penggalian Potensi
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Penggalian Potensi
003	Dokumen Informasi di bidang Intelijen Penegakan Hukum
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penegakan Hukum
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penegakan Hukum
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum
004	Dokumen Informasi di Bidang Operasi Intelijen
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Operasi Intelijen
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Operasi Intelijen
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Operasi Intelijen
205	Whistle Blowing System (WBS)
S01	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan (LHIP) Dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUKPER)
51	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
52	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
53	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
1660	Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding
501	Layanan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali
001	Layanan Keberatan
051	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Keberatan
002	Layanan Banding dan Peninjauan Kembali
051	Perencanaan Layanan Banding dan Peninjauan Kembali
052	Pelaksanaan Sidang Banding Gugatan ke Pengadilan Pajak
053	Pengajuan Peninjauan Kembali Ke Makamah Agung
054	Peer Review kegiatan evaluasi atas proses penyelesaian pembedulan, keberatan, pengurangan, atau pen
1661	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi
501	Dokumen Peningkatan Kepatuhan dan Investigasi Internal
001	Dokumen Kepatuhan Internal
051	MONITORING DAN EVALUASI INTERNALISASI KEPATUHAN
052	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
053	PENJAMINAN KUALITAS DAN MANAJEMEN RISIKO
002	Dokumen Investigasi Internal
051	PELAKSANAAN INVESTIGASI INTERNAL
052	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN
502	Layanan Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai
001	Tanpa Sub Output
051	PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DJP
052	ASSESSMENT KOMPETENSI PEGAWAI
053	MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
054	PELAKSANAAN LAYANAN PENDUKUNG OPERASIONAL DIREKTORAT
055	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DJP
206	IMPLEMENTASI E-LEARNING DJP
503	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Organisasi
001	Dokumen Rencana Strategis
051	MONITORING, EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN RENSTRA DJP
052	ASISTENSI TEKNIS PIHAK DONOR PENDUKUNG RENSTRA
002	Dokumen Transformasi Organisasi
051	PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP DESAIN KELEMBAGAAN
052	EVALUASI DAN IMPLEMENTASI KONSEP DESAIN KELEMBAGAAN
053	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN TRANSFORMASI ORGANISASI
207	PEMBENTUKAN KPP MIKRO
003	Dokumen Pengembangan Manajemen Kepegawaian
051	PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MUTASI, PROMOSI DAN KOMPENSASI
052	PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KLASIFIKASI JABATAN
053	PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA
1662	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan
501	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Perpajakan
001	Tanpa Sub Output
051	Penyusunan Perencanaan pemeriksaan
052	Penyusunan Kebijakan Pemeriksaan Transaksi Khusus
053	Penyusunan Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan
054	Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan
502	Kebijakan di Bidang Penagihan Perpajakan
001	Tanpa Sub Output
051	Penyusunan database tindakan penagihan pajak

PAGU ALOKASI 2018

Kode	Uraian
052	Percepatan Tindakan Penagihan Pajak
053	Reviu, Monitoring dan Evaluasi
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat
1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis
501	Kebijakan di Bidang Potensi dan Penerimaan
001	Kebijakan di Bidang Penggalian Potensi Perpajakan
051	Penyusunan Kebijakan dan Standarisasi Penggalian Potensi Perpajakan
052	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Teknik Kebijakan Penggalian Potensi Perpajakan
053	Analisis Dampak Kebijakan Perpajakan
054	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang
002	Kebijakan di Bidang Penerimaan Pajak
051	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Administrasi Penerimaan Pajak
052	Pemantauan dan Evaluasi Penerimaan Pajak
502	Kebijakan di Bidang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
001	Tanpa Sub Output
051	Penyusunan Kebijakan dan Standarisasi di Bidang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan
052	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan di bidang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan
208	Compliance Risk Management
209	Pembangunan SIMDK (Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan)
210	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data
1664	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
501	Rancangan Peraturan di Bidang PPN dan PTLL
001	Rancangan Peraturan di Bidang PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL
051	Pengkajian Rumusan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL
052	Koordinasi dan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PPN Perdagangan, Jasa, dan PT
053	Pemantauan dan Evaluasi Perumusan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PPN, Perdagangan, Jasa, dan PTLL
002	Rancangan Peraturan di Bidang PPN Industri
051	Koordinasi dan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PPN Industri
502	Rancangan Peraturan di Bidang PBB, BPHTB, KUP dan PPSP
001	Rancangan Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB
051	Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB
052	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Tugas di Bidang PBB dan BPHTB
053	Pemantauan dan Evaluasi Perumusan Kebijakan dan Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan di Lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I
002	Rancangan Peraturan di Bidang KUP dan PPSP
051	Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang KUP dan PPSP
053	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan RUU KUP
1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh
501	Rancangan Peraturan di bidang PPh
001	Tanpa Sub Output
051	Perumusan Rancangan Peraturan PPh Badan
052	Perumusan Rancangan Peraturan PPh Pemotongan dan Pemungutan dan PPh Orang Pribadi
053	Pelaksanaan Pemberian Bimbingan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
502	Layanan Bantuan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan
001	Layanan Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak
051	Persiapan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan
053	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak
054	Pelaksanaan Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan
002	Layanan Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan
052	Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan
053	Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tugas
1666	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi
501	Sistem Informasi di Bidang Perpajakan
001	Sistem Informasi dan Sarana Pendukungnya
051	Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
052	Pengembangan Perangkat Lunak Teknologi Informasi
053	Koordinasi Internal Eksternal Pengembangan Teknologi Informasi
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan
002	Aplikasi Perpajakan
052	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan
101	Core Tax System
001	Tanpa Sub Output
051	Pengembangan Core Tax System Tahap I
052	Implementasi Core Tax System Tahap I
1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah
022	[SBK] Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Luar Jawa
K01	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
051	Persiapan Penyidikan
052	Pelaksanaan Penyidikan
053	Koordinasi dengan Korwas PPNS dan Kejaksaan
054	Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan
023	[SBK] Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Jawa

PAGU ALOKASI 2018

Kode	Uraian
K01	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
051	Persiapan Penyidikan
052	Pelaksanaan Penyidikan
053	Koordinasi dengan Korwas PPNS dan Kejaksaan
054	Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan
024	Penyanderaan (Gijzeling)
K01	tanpa sub output
051	Koordinasi dengan Aparat Kepolisian dan Ditjen Pemasarakatan
052	Pelaksanaan Kegiatan Penyanderaan (Gijzeling)
A	Kegiatan Penyanderaan
B	Perpanjangan Sandera
025	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Sumatera
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
026	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Jakarta
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
027	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Jawa dan Bali
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
028	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Kalimantan
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
029	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
030	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Papua dan
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
031	[SBK] Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus dan WP Besar
K01	tanpa sub output
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
501	Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan
001	Pelayanan Perpajakan
051	Pelaksanaan Penyuluhan dan Kehumasan
052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan
053	Peningkatan Kualitas Pelayanan
204	Business Development Service (BDS)
002	Pengawasan Perpajakan
051	Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian
052	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak
053	Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak
054	Penyelesaian Keberatan
055	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
056	Dukungan Pengamanan Penerimaan
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
994	Layanan Perkantoran
001	Tanpa Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1668	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

PAGU ALOKASI 2018	
Kode	Uraian
501	Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan
001	Pelayanan Perpajakan
051	Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan
052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan
053	Peningkatan Kualitas Pelayanan
204	Business Development Service (BDS)
002	Pengawasan Perpajakan
051	Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian
052	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak
053	Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak
054	Dukungan Pengamanan Penerimaan
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
994	Layanan Perkantoran
001	Tanpa Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan
501	Layanan Pengolahan Data Perpajakan
001	Tanpa Sub Output
051	Pelayanan Pengolahan Data Perpajakan
052	Peningkatan Kualitas Pelayanan
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
211	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
994	Layanan Perkantoran
001	Tanpa Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
001	Layanan Organisasi dan Ketatalaksanaan
051	Penataan Organisasi dan Tata Laksana
052	Manajemen Kinerja Organisasi
053	Penyusunan Laporan Organisasi DJP
002	Layanan Pengelolaan Keuangan
051	Perencanaan dan Penyusunan RKA-K/L DIPA
052	Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
053	Dukungan Layanan Perkantoran Satuan Kerja
003	LAYANAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN KEPANGKATAN KEPEGAWAIAN
053	Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan, Penempatan, dan Kepangkatan Kepegawaian
006	Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai
051	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
052	Pengembangan Sumber Daya Manusia
004	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara
051	Perencanaan Kebutuhan BMN
052	Pelaksanaan Layanan Pengelolaan BMN
053	Pemantauan dan Pelaporan BMN
005	Layanan Umum
051	Pelaksanaan ICV dan IHT
052	Kegiatan Penunjang Operasional Sekretariat
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
994	Layanan Perkantoran
001	Tanpa Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan
501	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan
001	Tanpa Sub Output
051	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan

PAGU ALOKASI 2018	
Kode	Uraian
052	Peningkatan Kualitas Pelayanan
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
212	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
994	Layanan Perkantoran
001	Tanpa Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5879	Peningkatan Kegiatan Penyidikan
501	Dokumen di Bidang Penegakan Hukum
S01	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
051	Penyusunan Rencana Penyidikan dan Penyampaian SPDP
052	Pemeriksaan Saksi / Tersangka dan Penindakan
053	Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti
054	Persidangan
055	Evaluasi dan Monitoring Penyidikan
U01	LPBP DENGAN TINDAK LANJUT PENYIDIKAN
051	Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
053	Pengawasan Pemeriksaan Bukti Permulaan
054	Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pelaporan
055	Evaluasi dan Monitoring Pemeriksaan Bukti Permulaan
501	DOKUMEN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM
054	Pelaksanaan Kegiatan Forensik dan Barang Bukti
056	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat
501	Dokumen di Bidang Penegakan Hukum
001	Dokumen di bidang Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik
051	Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan
053	Memastikan Kualitas dan Konsistensi Penegakan Hukum
054	Pelaksanaan Kegiatan Forensik dan Barang Bukti
055	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Penegakan Hukum
056	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat
951	Layanan Internal (Overhead)
001	Tanpa Sub Output
213	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5880	Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional
501	Rancangan Peraturan di Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional, Penanganan Sengketa
001	Tanpa Sub Output
051	Persiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perpajakan Internasional
052	Pelaksanaan Perumusan Peraturan di bidang Perpajakan Internasional
053	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan Internasional
054	Pelaksanaan Kerja Sama Internasional di bidang Perpajakan
055	Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Internasional
056	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Tugas
214	Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI)
502	Layanan di Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional, Penanganan Sengketa dan Pertuk
001	Layanan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
051	Persiapan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
052	Pelaksanaan Peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa
053	Diseminasi Peraturan Pencegahan dan Penanganan Sengketa
054	Monitoring Pelaksanaan Hasil Perundingan MAP/APA
002	Layanan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara/yurisdiksi m
051	Persiapan Pelaksanaan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara
052	Pelaksanaan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara/yurisdik
053	Diseminasi Peraturan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan
054	Pelaksanaan Penilaian atas Kegiatan Pertukaran Informasi di Indonesia
055	Monitoring Pelaksanaan Hasil Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif